

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh asupan gizi yang buruk dalam jangka waktu yang lama. Dengan kata lain, *Stunting* akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di kemudian hari. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), merupakan masa penting yang menentukan kualitas kehidupan anak dari 270 hari selama kehamilan hingga 730 hari pertama setelah bayi dilahirkan. *Stunting* merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius terjadi di masyarakat saat ini, karena prevalensi *Stunting* yang masih tinggi di beberapa Negara berkembang, salah satunya Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka *Stunting* Indonesia sudah menurun menjadi 21,6 % dari 24,4 % pada tahun 2021 (Indonesia, 2019).

Berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia termasuk ke dalam prevalensi *Stunting* tinggi di Negara ASEAN. Ini disebabkan karena adanya kesenjangan pendapatan rumah tangga serta faktor sejarah etnis dan budaya. Kejadian *Stunting* di ASEAN secara konsisten memiliki prevalensi yang lebih tinggi di daerah dengan pendapatan yang lebih rendah (Lestari, 2023).

Permasalahan *Stunting* ini berkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan program pembangunan secara berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dunia, melestarikan alam, serta menjadi acuan dalam kerangka pembangunan di beberapa Negara yang ada

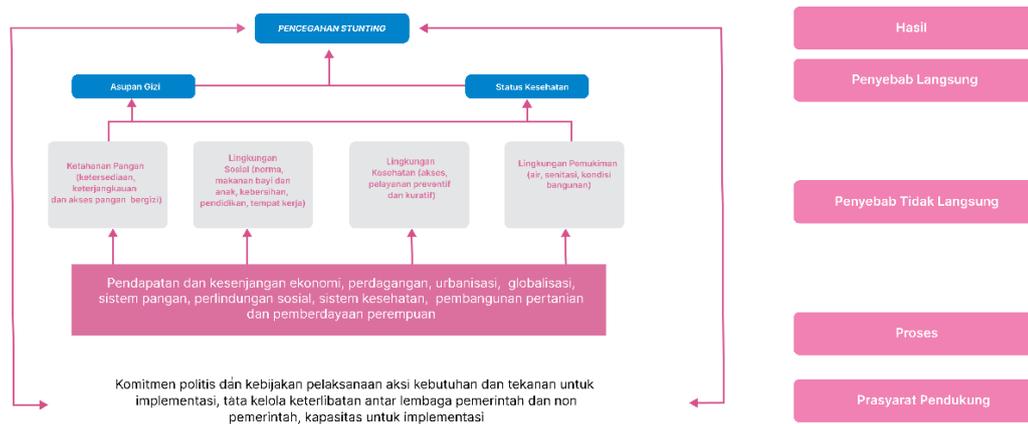
di dunia. *Stunting* termasuk salah satu target pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) yang ke-2, tujuannya adalah untuk menghilangkan kelaparan dan semua jenis malnutrisi pada tahun 2030 dan mencapai ketahanan pangan pada tahun 2025. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka *Stunting* hingga 40 % pada tahun 2025 (Indonesia, 2019).

Permasalahan *Stunting* memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam jangka pendek, pada kasus *Stunting* akan menyebabkan kegagalan dalam perkembangan kognitif dan motorik dari anak, serta tinggi badan yang rendah serta gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah. Permasalahan berkaitan dengan syaraf-syaraf dan sel otak sehingga penyerapan dalam proses pembelajaran menjadi lambat (Rahman et al., 2023).

Percepatan penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, integrative, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres, 2021) dan memperkuat pelaksanaannya mengamanatkan disusunnya rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*, hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Kerangka Konsep Penyebab dan Pencegahan *Stunting*
Gambar 1. 1 Kerangka Konsep Penyebab dan Pencegahan *Stunting*



(Sumber : Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting*)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026, Pemerintah Provinsi Jambi kemudian bermusyawarah bersama Kabupaten/Kota menetapkan target penurunan prevalensi *Stunting* di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang kemudian disampaikan melalui surat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Nomor S-050/1684/BAPPEDA-3.2/VI/2022 tentang Target Penurunan *Stunting* Provinsi Jambi dan berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi *Stunting* di Provinsi Jambi berada pada urutan ke-2 terendah di Indonesia, yaitu sebesar 13,5 % dan angka ini juga lebih kecil dibandingkan dengan prevalensi *Stunting* nasional sebesar 21,5 % (Bappeda Provinsi Jambi, 2021).

Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Provinsi, Gubernur sebagai ketua pengarah menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat provinsi yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi. Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dipimpin oleh wakil gubernur sebagai ketua pelaksana yang dibantu wakil ketua pelaksana yang dapat terdiri dari sekretaris daerah, kepala BAPPEDA dan ketua organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya (Permanasari et al., 2020). Salah satu wujud komitmen pemerintah adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 14 % secara nasional dan 12 % di Provinsi Jambi. Dalam Perpres tersebut juga ditekankan bahwa fokus pendekatan intervensi adalah pada keluarga berisiko *Stunting*, tidak hanya pada balita *Stunting* (PROVINSI, 2023). Provinsi Jambi dalam hal ini juga berhasil menurunkan angka Prevalensi *Stunting* sebesar 4,4 % pada tahun 2022, sehingga menjadi 18,0 % dan menempatkan Provinsi Jambi menjadi 7 Provinsi dengan angka Prevalensi terendah di Indonesia (PROVINSI, 2023).

Angka prevalensi *Stunting* Provinsi Jambi dapat dilihat pada diagram

gambar 1.2 berikut ini :

Gambar 1. 2 Angka Prevalensi *Stunting* Provinsi Jambi

(Sumber : Bappeda Provinsi Jambi)

Berdasarkan kurva di atas dapat dilihat meskipun secara kuantitas *Stunting* di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan pada kualitas penanganan masalah gizi dan *Stunting* karena dalam target Pemerintahan Daerah harus berupaya untuk melakukan percepatan penurunan *Stunting* dengan target yang harus dicapai, yaitu 14 % secara nasional dan 12 % khususnya di Provinsi Jambi. Berdasarkan data 3 tahun terakhir dari 11 Kabupaten/Kota itu hanya 1 Kabupaten yang dapat mencapai target dibawah 12 %, yaitu Tanjung Jabung Barat dengan prevalensi *Stunting* sebesar 9,9 % pada tahun 2022.

“ Terlepas dari upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* yang semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah Bersama *Stakeholder*terkait. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan angka *Stunting* sebesar 12 % pada tahun 2024.

Dalam 2 tahun terakhir, angka *Stunting* di Provinsi Jambi terus menurun. Kata Fery T. Sihotang, praktisi gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi hari ini. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 menunjukkan angka *Stunting* di Provinsi Jambi sebesar 21,8 % turun menjadi 18,8 % pada SSGI Tahun 2022. Fery menjelaskan bahwa hasil SSGI Tahun 2023 belum keluar, tetapi diharapkan angka *Stunting* sebesar 14 % dan di tahun 2024 diharapkan angka *Stunting* sebesar 12 % atau di bawah angka nasional “ (Wijaya, 2024).

Meskipun Provinsi Jambi menunjukkan trend penurunan dalam prevalensi *Stunting*, realitas menunjukkan bahwa pencapaian target nasional dan daerah masih belum optimal. Keberhasilan satu kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Barat berhasil mencapai prevalensi *Stunting* di bawah 12% menunjukkan bahwa pencapaian target sangat mungkin dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Namun, keberhasilan tersebut belum dapat diterapkan secara konsisten di seluruh kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang membedakan keberhasilan Tanjung Jabung Barat dari kabupaten lainnya, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian target *Stunting* di daerah-daerah lain.

Melihat kejadian ini menjadi tugas utama Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dalam menuntaskan percepatan penurunan *Stunting* perlu dilakukan untuk menjamin generasi di masa depan yang akan menjadi generasi potensial yang membawa bangsa ini kepada kemajuan yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih besar atau yang disebut konvergensi agar menjaga, mengendalikan serta mencegah sehingga potensi status gizinya berubah

akibat dari tata kelola yang salah, proses pemenuhan serta asuhan yang tidak tepat. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi menjadi wakil ketua pelaksana kegiatan percepatan penurunan *Stunting*, BAPPEDA Provinsi Jambi juga berperan sebagai koordinator pada bidang koordinasi dan konvergensi pelaksanaan kegiatan tersebut. Dipilihnya BAPPEDA sebagai koordinator dan leading sector dalam konvergensi ini dilatarbelakangi karena posisi dari BAPPEDA sebagai perencana dan pengarah dalam menjalankan proses pemerintahan di daerahnya masing-masing. BAPPEDA juga dinilai dapat menemukan jalan untuk memudahkan berkoordinasi antar Lembaga-lembaga pemerintahan yang dinaunginya.

Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka *Stunting* Provinsi Jambi yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait data, intervensi sensitive dan spesifik, proses, serta faktor-faktor lainnya mengenai penurunan *Stunting* di Provinsi Jambi. Selain itu, baru saja terbit Perpres No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting* (Perpres, 2021). Jika membaca lebih detail mengenai Perpres tersebut, sangat banyak pihak yang diberikan kewenangan dan tugas untuk menangani *Stunting*, beberapa diantaranya:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak (DP3AP2)
4. TP PKK Provinsi Jambi,
5. Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

6. Sektor Swasta, dan
7. Dosen FKIK Unja.

Berkaca dari kondisi di atas, maka diperlukan *Collaborative planning* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan strategi untuk mengatasi masalah *Stunting* secara holistic khususnya di Provinsi Jambi. *Collaborative planning* adalah proses pengambilan keputusan di mana pemangku kepentingan dari berbagai sudut pandang melihat masalah bersama untuk menggali perbedaan, melalui komunikasi dan dialog untuk mencari solusi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai hasil yang optimal. Ini tentunya membuat Lembaga lintas sektoral harus mampu melakukan strategi untuk mengatasi masalah *Stunting* secara menyeluruh, melibatkan BAPPEDA Provinsi Jambi sebagai Lembaga yang merencanakan upaya, strategi, dan komitmen untuk penurunan angka *Stunting* dan Dinas Kesehatan sebagai Lembaga yang menjalankan dan mengimplementasikan perencanaan yang telah ditetapkan terkait penurunan angka *Stunting* di wilayah Provinsi Jambi.

Keterlibatan berbagai pihak atau pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* karena permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan saja. Peran *Stakeholder* tersebut diperlukan untuk mendorong keberhasilan dalam percepatan penurunan *Stunting* di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, diperlukan *Collaborative planning* dalam upaya

percepatan penurunan *Stunting* yang dilakukan secara timbal balik melalui hubungan secara vertical maupun horizontal, yaitu melalui pemerintah maupun tanggung jawab bersama antar masyarakat. Peran semua *Stakeholder* sangat penting untuk mendorong percepatan penurunan *Stunting* dengan berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga pemenuhan gizi menjadi lebih baik, pola asuh lebih terarah sehingga menjamin generasi menjadi lebih berkualitas di masa depan dan inilah aset yang perlu dirawat.

Hasil penelusuran terhadap peneliti sebelumnya telah memungkinkan penulis menemukan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Sangat bermanfaat untuk menghindari objek penelitian yang mirip dan dapat menentukan di mana penelitian sebelumnya berbeda. Dengan demikian, penulis menyampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Penelitian tentang penanganan *Stunting* di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan berbagai pendekatan dan hasil yang relevan. (Dewi et al., 2023) menemukan bahwa program penyuluhan dan donasi telur di Desa Muruy, Pandeglang, berhasil meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi bagi balita dan melibatkan kolaborasi multisektor untuk menangani *Stunting*, sejalan dengan strategi nasional yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 72/2021. Temuan ini memperkuat hasil dari penelitian (Yusra et al., 2017), yang menunjukkan bahwa diskusi bersama kader posyandu di Desa Suka Maju dapat meningkatkan pemahaman dan solusi untuk masalah *Stunting*. (Sukanti & Faidati, 2021) melanjutkan dengan menyoroti efektivitas kolaborasi berbagai *Stakeholder* di Kabupaten Sleman, meski masih ada tantangan seperti kurangnya forum

komunikasi khusus. Hal ini relevan dengan temuan (Syamsuadi et al., 2023), yang menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan integrasi program untuk keberhasilan penurunan *Stunting*, menegaskan bahwa dukungan hukum dan kebijakan jelas sangat diperlukan. Di sisi lain (Sarita et al., 2022) mengidentifikasi bahwa penggunaan aplikasi *e-HDW* di Kabupaten Ogan Komering Ulu mempermudah pencatatan data *Stunting* dan mendukung peran Kader Pembangunan Manusia, yang juga didukung oleh hasil penelitian (Salmon et al., 2022) yang menunjukkan pentingnya pelatihan dan bimbingan dalam penggunaan aplikasi serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas program. (Viona Erlanda & Dida Rahmadanik, 2023) melaporkan keberhasilan proses kolaborasi di Kota Surabaya dalam penurunan angka *Stunting*, mencerminkan pendekatan yang efektif yang juga diakui dalam penelitian (Widyowati, 2023) tentang tata kelola pemerintahan kolaboratif di Kabupaten Wonogiri. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan dialog antar *Stakeholders* sangat krusial. Terakhir, (Prasodjo et al., 2024) dan (Permatasari & Walinegoro, 2023) menekankan pentingnya penguatan instrumen kolaborasi dan perluasan jaringan kerjasama dalam pencegahan *Stunting* di Kabupaten Malang dan Sleman, menunjukkan bahwa kolaborasi yang mendalam dan inovatif merupakan fondasi penting untuk mencapai tujuan berkelanjutan dalam penurunan *Stunting*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebagian besar penelitian berfokus pada keberhasilan suatu program, seperti penyuluhan dan donasi telur, penggunaan aplikasi digital, atau kolaborasi multisektor di tingkat lokal. Namun, pada penelitian ini menekankan pada

pentingnya kerja sama dalam perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dalam merancang kebijakan dan strategi secara menyeluruh dan terkoordinasi dalam upaya penurunan angka *Stunting* di Provinsi Jambi. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam menangani *Stunting* dengan penekanan pada proses perencanaan yang melibatkan semua pihak terkait serta pengembangan kebijakan yang berbasis pada kolaborasi strategis di tingkat Provinsi.

Dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu yang telah tercantum di atas yang dilakukan oleh beberapa peneliti, maka penulis tertarik untuk memberikan temuan baru dalam menekan angka *Stunting* khususnya di Provinsi Jambi yang berfokus melihat kolaborasi antar *Stakeholder* dalam perencanaan penurunan angka *Stunting*. Penulis berharap dapat mengeksplorasi kerja sama antara berbagai pihak dapat menghasilkan solusi yang lebih optimal. Maka dari itu, penulis mengusulkan judul “ ***Collaborative planning Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting Di Provinsi Jambi*** “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan dan menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi perencanaan kolaboratif antar *Stakeholder* untuk menurunkan angka *Stunting* di Provinsi Jambi ?
2. Apa saja faktor yang paling mempengaruhi proses jalannya perencanaan kolaboratif dalam menurunkan angka *Stunting* di Provinsi Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan antar *Stakeholder* dalam perencanaan kolaboratif untuk menurunkan angka *Stunting* di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis faktor yang paling mempengaruhi jalannya perencanaan kolaboratif dalam menurunkan angka *Stunting* di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam tentang kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan yang dapat mempengaruhi efektivitas program penurunan *Stunting*. Hal ini dapat mengembangkan teori perencanaan kolaboratif dengan menggali dinamika, proses, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung dan merencanakan program ke depan yang lebih baik, jika masih terdapat program yang belum maksimal pelaksanaannya.

1.5 Landasan Teori

Konsep teori akan memberikan panduan dan arahan bagi peneliti untuk menganalisis topik yang diangkat serta membantu dalam menemukan sumber masalah di lapangan. Beberapa teori akan menjelaskan indikator dan melakukan identifikasi serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan takaran variabel topik penelitian. Teori-teori berikut digunakan oleh peneliti sebagai referensi penelitian :

1.5.1 Perencanaan Kolaboratif (*Collaborative planning*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Kolaboratif “ secara harfiah berarti kerja sama, kolaborasi, persekutuan, atau menyatu. Perencanaan Kolaboratif adalah setiap proses pengambilan keputusan oleh individu maupun kelompok organisasi kepentingan yang melibatkan komunikasi, interaksi, dan diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. Perencanaan kolaboratif memerlukan hubungan antara individu atau kelompok kepentingan satu dengan kelompok kepentingan lain, sehingga terjadi interaksi dan komunikasi dua arah. Dalam perencanaan kolaboratif, semua pihak yang berpartisipasi dalam proses tersebut harus memiliki akses ke komunikasi dan interksi dua arah.

Perencanaan Kolaboratif (*Collaborative planning*) adalah sebuah proses panjang untuk membuat keputusan di mana pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengeksplorasi potensi dan perbedaan dari masalah secara mendalam. Mereka sepakat tentang solusi alternatif dan mencapai sesuatu yang lebih besar daripada hanya mencari solusi satu-satu (*Healey, 1997*).

Dalam perencanaan, proses kolaboratif terjadi ketika diskusi berakhir dengan pengambilan keputusan. Proses ini hanya dapat terjadi ketika terpenuhi beberapa pra syarat, yaitu :

- a. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi yang tinggi biasanya muncul dalam masyarakat yang sudah menjalankan sistem demokrasi.
- b. Terdapat kondisi di mana ada kesetaraan kekuasaan. Partisipasi dengan tidak ada dominasi kekuasaan oleh pihak tertentu.
- c. Terdapat *Stakeholder* yang kompeten. Melakukan dialog yang menghasilkan suatu keputusan (Sufianty, 2014).

Aspek politik dan sosial sangat penting dalam perencanaan. Interaksi antar pihak berwenang dalam konteks pembelajaran sosial (*Social Learning*) adalah bagian dari elemen tersebut. Interaksi antar pihak berwenang banyak dibahas dalam perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif adalah jenis perencanaan di mana berbagai pihak bekerja sama untuk mencapai konsensus melalui diskusi dan kerja sama. Perencanaan kolaboratif membutuhkan otoritas kuat dan arahan yang fleksibel. Dalam tahapan proses perencanaan tidak harus sama dengan teori perencanaan kolaboratif tetapi dapat disesuaikan menurut kondisi kawasan dan *Stakeholder* yang ada (Kartikakirana & Mandala, 2013).

Perencanaan Kolaboratif adalah sebuah model perencanaan berbasis kewarganegaraan yang mendelegasikan tanggung jawab untuk menyiapkan rencana secara langsung kepada para pemangku kepentingan yang terdampak (Gunton & Day, 2003).

1.5.2 Dasar Teori Perencanaan Kolaboratif

Teori perencanaan kolaboratif pertama kali muncul pada tahun 1984 yaitu Teori Communication Rationality yang menekankan cara menemukan dan menghasilkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama-sama tetapi berbeda dalam ruang dan waktu (Healey, 1997). Teori *The Structuration* dari Giddens menekankan pada konsep interaksi secara terus menerus dan saling berkoordinasi. Dari kedua teori tersebut maka dapat dijelaskan bahwa perencanaan kolaboratif menekankan pada pemecahan masalah yang ditangani secara bersama-sama dengan melibatkan interaksi semua pelaku.

1.5.3 Proses Perencanaan Kolaboratif

Proses perencanaan kolaboratif merupakan pendekatan yang menekankan pada keterlibatan berbagai pihak dalam seluruh tahapan perencanaan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, hingga evaluasi dan implementasi. Proses perencanaan kolaboratif digambarkan sebagai berikut :

a. Proses Dialog dan Identifikasi

Proses pertama adalah berbicara secara langsung antara pihak yang ingin bekerja sama. Dalam proses ini, mereka bernegosiasi dengan pihak yang diajak bekerja sama. Adanya proses diskusi dan identifikasi *Stakeholder* untuk dapat berbicara secara langsung dan menghilangkan hambatan dalam komunikasi merupakan dasar penting dari kolaborasi. Di Provinsi Jambi, untuk mempercepat penurunan *Stunting*, diskusi tatap muka dapat dilakukan mulai dari tim kecil OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tim besar TPPS (Tim Percepatan Penurunan

Stunting), hingga dalam skala yang lebih luas melibatkan instansi vertikal, yaitu Rembuk *Stunting*.

a. Proses Kelembagaan

Selama proses ini, kegiatan penyusunan strategi dilakukan, tingkat keterlibatan masing-masing *Stakeholder* diidentifikasi, dan pembentukan kelembagaan ditetapkan. Organisasi atau pengorganisasian berarti mengelompokkan tugas yang diperlukan dan bagaimana tugas-tugas tersebut berhubungan satu sama lain dalam struktur organisasi atau institusi. Organisasi pemerintah adalah yang paling dominan dalam mengelola suatu tempat atau wilayah. Pemerintahan terdiri dari organisasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Proses kelembagaan bukan hanya tentang struktur organisasi, tetapi juga tentang bagaimana struktur ini dapat mengatur berbagai upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam penurunan angka *Stunting* terutama di Provinsi Jambi.

b. Proses Persetujuan dan Komitmen

Selama proses ini, sudah ada kesepakatan dan pengambilan keputusan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kerjasama. Konsekuensi yang dicapai tentang masalah diatur sesuai persetujuan bersama. Komitmen dan persetujuan terkait dan saling mendukung untuk memulai suatu inisiatif atau program, diperlukan persetujuan, sedangkan komitmen menunjukkan bahwa rencana yang telah disepakati akan dilaksanakan dengan serius dan berkelanjutan. Dalam perencanaan penurunan *Stunting*, persetujuan dan komitmen merupakan langkah awal. Akan tetapi juga fondasi yang kuat untuk membangun upaya

berkelanjutan yang akan meningkatkan kondisi kesehatan anak-anak dan memastikan masa depan yang lebih baik.

c. Proses Rencana

Selama proses ini, aktivitas terjadi untuk merencanakan langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan secara bersamaan dengan tujuan bersama untuk menyelesaikan masalah. Dalam kolaborasi perencanaan, proses rencana adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh berbagai entitas atau pihak untuk membuat rencana bersama. Dalam upaya penurunan *Stunting*, Berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum bekerja sama untuk merumuskan strategi dan tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah *Stunting*.

d. Proses Implementasi dan Pencapaian Tujuan

Proses ini adalah proses pelaksanaan rencana yang telah dibuat oleh semua pihak yang terlibat. Semua pihak berpartisipasi dalam proses ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam perencanaan, dua tahapan penting setelah perumusan rencana adalah implementasi dan pencapaian tujuan. Dalam upaya penurunan *Stunting*, ini melibatkan serangkaian tindakan yang terorganisir untuk merancang, mengimplementasikan, dan mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk mengurangi prevalensi *Stunting* di wilayah tertentu.

e. Proses Evaluasi

Mengevaluasi dilakukan dari tahap setting identifikasi hingga implementasi. Hasil evaluasi mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses perencanaan kolaboratif. Jika hasilnya tidak menunjukkan

perbaikan, maka proses ini terus berlanjut untuk menyusun rencana perbaikan sampai tujuan bersama dapat dicapai. Tahap-tahap dalam proses evaluasi terdiri dari Pra-negosiasi, Negosiasi, dan Pasca-negosiasi adalah tahap kolaborasi yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, pihak-pihak yang terlibat harus aktif berpartisipasi dalam proses tersebut.

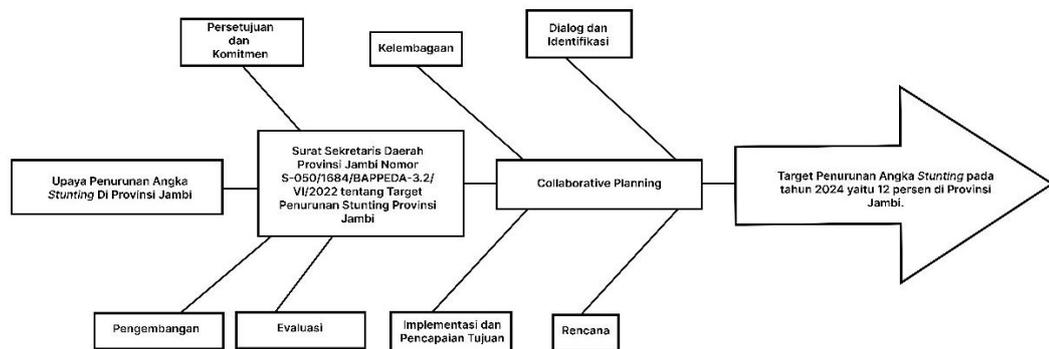
f. Proses Pengembangan

Setelah adanya evaluasi, maka kekurangan-kekurangan pada saat implementasi mulai dikembangkan sampai hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya (*Healey, 1997*).

1.6 Kerangka Pikir

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis jabarkan, berikut ini kerangka pikir yang disusun untuk membatasi penelitian ini :

Gambar 1. 3 Kerangka Pikir



Sumber : Diolah oleh penulis

perencanaan pembangunan daerah, salah satunya perencanaan pembangunan kesehatan secara komprehensif pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Sebagai contoh, selain Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi menjadi wakil ketua pelaksana kegiatan percepatan penurunan *Stunting*, BAPPEDA Provinsi Jambi juga berperan sebagai koordinator pada bidang koordinasi dan konvergensi pelaksanaan kegiatan tersebut.

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana kolaborasi yang telah dibangun antara berbagai pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Daerah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Sektor Swasta, dan Masyarakat Sipil dalam konteks perencanaan untuk penurunan angka *Stunting* di Provinsi Jambi dan faktor penentu pelaksanaan perencanaan kolaboratif tersebut.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah istilah yang mengacu pada sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jumlah sumber data yang diperlukan bervariasi tergantung pada jumlah data yang diperlukan dan seberapa lengkap data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data biasanya dikumpulkan oleh peneliti yang menerapkan metode penelitian kualitatif berasal dari berbagai referensi. Sumber data ini dapat diperoleh dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama. Data primer ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau file-file. Sebaliknya, mereka harus

dicari melalui narasumber, yaitu mereka yang digunakan sebagai objek penelitian atau sebagai sumber data atau informasi. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada dinas terkait yang berwenang dalam penelitian ini, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, BKKBN, PKK, Dosen FKIK UNJA, (DP3AP2), dan sektor swasta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mengacu pada catatan atau dokumentasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti peraturan pemerintah, berita, artikel dan jurnal. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yang dapat diakses melalui laman website Jambi Data Analytic Centre, dan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka *Stunting* Provinsi Jambi.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang benar-benar memahami masalah yang akan diteliti. Informasi ini menjadi kunci dalam penelitian untuk memecahkan masalah. Untuk penentuan informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik *purposive sampling*. Sama halnya dalam penelitian ini juga menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan yang dimana *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan dengan tujuan tertentu.

Informan yang peneliti butuhkan terkait objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Instansi	Jabatan
1	Ade Irawansyah, S.H., M.H.,	Bappeda Provinsi Jambi	Kasubbid PPM II
2	Oki Permana, SKM, M.Kes.,	Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	Satgas Stunting Provinsi Jambi
3	Eny Yuliati, SKM, MPH.,	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Kasi Kesga dan Gizi Masyarakat
4	Bayu Eka Putra, S.E.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	Hj. Meity, SP.,	TP PKK Provinsi Jambi	Ketua Pokja III
6	Rudy Jasthon Siahaan	Sektor Swasta	Koordinator CSR Asian Agri Plantation 3 Jambi
7	Ashar Nuzulul Putra, S.K.M., M.Epid,	Universitas Jambi	Dosen Bidang Epidemiologi FKIK.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan :

a. Wawancara

Wawancara adalah jenis percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang dilakukan antara dua orang, yaitu orang yang diwawancarai yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab langsung dengan orang yang diwawancarai atau mendengarkan langsung tentang topik yang dibicarakan.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sarna, maka diperlukan training kepada calon pewawancara (Esterberg, n.d.).

b. Dokumentasi

Merupakan proses mencari data sumber berupa tulisan, gambar, catatan, dan buku yang berkaitan dengan subjek penelitian. Selain itu, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari catatan tertulis dan dokumen serta mempelajari secara menyeluruh tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mengorganisasikan data yang dikumpulkan. Ini dapat digunakan untuk mengelompokkan, mengatur, mengurutkan, memberikan kode, dan mengkategorikan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis data berikut yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman :

- a. Pengumpulan Data, analisis data dan penelitian ini sudah dilakukan sejak peneliti turun ke lapangan, dimulai dari mengumpulkan data dari proses wawancara kepada informan yang relevan dengan informasi yang terkait dengan upaya percepatan penurunan *Stunting* di Provinsi Jambi.
- b. Reduksi Data, yaitu dilanjutkan mengkategorikan data yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Penyajian Data, yaitu peneliti menyampaikan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari tempat penelitian dan dapat dilihat pada bab 3 hasil dan pembahasan.
- d. Penarikan Kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan dari penelitian dengan mempertimbangkan hasilnya sehingga data yang dikumpulkan tidak

menyimpang dari data yang dikumpulkan atau dianalisis (Miles et al., 2014).

1.7.8 Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah upaya untuk memastikan bahwa semua data yang diperoleh dan diteliti sesuai yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, akan diperlukan untuk menguji sumber data dengan teknik yang dikenal sebagai triangulasi untuk memastikan bahwa data yang dikirim benar dan valid. Triangulasi data adalah proses menguji kredibilitas data kualitatif dengan menilai kecukupan data berdasarkan konvergensi dari beberapa sumber data atau berbagai Teknik pengumpulan data. Menurut Moleong dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengevaluasi tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai metode kualitatif yang berbeda. Ini dicapai dengan membandingkan data pengamatan dengan data wawancara, membandingkan pernyataan orang di depan umum dengan pernyataan pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan. Adapun informan yang digunakan untuk keabsahan data adalah masyarakat penerima program dalam pengentasan *Stunting* , seperti program Bapak Asuh *Stunting* (BAAS) (Moleong, 2022). Dengan demikian triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan pemeriksaan informasi melalui beragam sumber. Untuk menguji kepercayaan penerapan *collabortive planning* maka

peneliti perlu menguji keabsahan data melalui para *Stakeholder* yang terlibat dalam kerjasama, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta, yaitu melalui wawancara langsung kepada pihak terkait dalam upaya penurunan *stunting*.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dapat dipergunakan peneliti dengan melakukan pengecekan kepada sumber, tetapi dengan metode yang berbeda. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber perlu diverifikasi melalui penggunaan teknik wawancara dan pemeriksaan dokumen. Adapun dokumen yang digunakan adalah RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana Aksi Daerah Penurunan *Stunting*, Dokumen Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Daerah, dan Data Prevalensi *Stunting* Provinsi Jambi.